

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA
BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Kajian Raperda Perlindungan Aset Lemah
Entitas / Cakupan : Provinsi Jawa Barat
Sumber / Hal : Radar Bandung / Hal.8
Edisi : Senin, 23 April 2018

Kajian Raperda Perlindungan Aset Lemah

BANDUNG- Persoalan pendataan, penanganan dan sertifikasi aset daerah yang belum terdata dengan baik sering menjadi bahan temuan bagi BPK, termasuk juga terjadi di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. Untuk itu, pemprov Jabar telah mengusulkan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) ke DPRD Jabar, tapi setelah ditelaah oleh

BP Perda DPRD Jabar ternyata kajian akademis masih lemah, sehingga dikembalikan lagi ke eksekutif.

Anggota Komisi I DPRD Jabar, Darius Dologsaribu SH mengatakan, persoalan aset daerah seringkali menjadi catatan tersendiri bagi BPK. Itu karena masih cukup banyak aset daerah yang tidak terdata atau terdata,



Darius Dologsaribu

tapi tidak dilengkapi dengan legalitas yang sah.

Untuk itu, DPRD Jabar mendorong Pemprov Jabar untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Aset Daerah. "Namun, usulan Rencana Perda yang disampaikan ke DPRD Jabar, ternyata kajian akademisnya masih cukup lemah, sehingga kita kembalikan lagi ke eksekutif,"

kata Darius saat ditemui kantor DPD PDIP Jabar, kemarin.

Dikatakan, sampai saat ini cukup banyak aset daerah yang tidak terdeteksi oleh kabupaten/kota maupun provinsi. Hal ini akibat lemahnya data, penanganan dan legalitas atas aset tersebut.

Sambil menunggu penyempurnaan kajian akademis Raperda Pengelolaan Aset, Komisi I DPRD Jabar melakukan kunjungan ke sejumlah daerah, baik ke kantor Pemkab/Pemkot, termasuk ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) se-Jawa Barat.

"BPN yang paling tahu sejarah tanah. Kami akhirnya

banyak mengetahui, bahwa banyak tanah yang belum bisa ditentukan siapa pemiliknya, sebab pemerintah kota, kabupaten belum memiliki perda pengelolaan aset," jelas Darius.

Temuan dan masukan dari lapangan akan menjadi bahan pertimbangan Komisi I maupun Pansus untuk mengundang BPN, Kabupaten, Kota dan Pro-

vinisi, agar bisa belajar tentang pengelolaan aset.

Lebih lanjut Darius mengaku bangga Pemprov dan dewan sudah enam kali meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), tapi selalu ada catatan khusus soal aset.

"Ini kan aneh, menerima predikat WTP, tapi selalu ada catatan khusus soal aset," ujarnya. (man/mun)